

ABSTRAK

DAVID PETRUS NICOLAS

Setiap orang wajib dijunjung tinggi hak dan kehormatannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dan bahkan tidak dapat dicabut oleh siapapun bahkan oleh dirinya sendiri. Khususnya perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi.

Metode Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematis, taraf sinkronisasi, perbandingan dan sejarah hukum.

Perlindungan terhadap wanita atas tindakan kesusilaan dalam Pasal 285 terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah: Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seorang wanita, Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya. Pertanggungjawaban hukum pidana atas tindakan pemerkosaan terhadap perempuan di luar ikatan perkawinan di dalam KUHP atau sering disebut *verkrachting*, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pidanaannya terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Pertimbangan hakim atas tindakan pemerkosaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 992 K/Pid/2020 tentang Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Saran dalam penelitian ini diharapkan aturan hukum dalam melindungi wanita dari tindakan kekerasan dan pemerkosaan lebih diperhatikan lagi supaya tidak semakin banyak yang menjadi korban. Diharapkan setiap pelaku pemerkosaan dapat dihukum dengan hukuman yang berat supaya menimbulkan efek jera bagi orang lain supaya tidak ada lagi kejadian yang sama. Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana pemerkosaan dapat memberikan perlindungan bagi setiap korban supaya selain korban tidak merasa trauma juga supaya korban tidak merasa malu.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Pemerkosaan

ABSTRACT

DAVID PETRUS NICOLAS

Everyone must have their rights and honor upheld without discriminating between men and women and cannot even be revoked by anyone, even by himself. Especially women as a group in society within a country is a group that is also obliged to get guarantees for the rights they have as a basis.

This research method is normative legal research using normative case studies in the form of legal behavior products. The main subject of the study is law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. So that normative legal research focuses on the inventory of positive law, legal principles and doctrine, legal discovery in cases in concreto, systematic, level of synchronization, comparison and legal history.

Protection of women for acts of decency in Article 285 contains elements to prove whether or not there was a crime of rape, the elements referred to are: Presence of violence or threats of violence, Forcing a woman, Having intercourse outside of marriage, meaning a fight between the genitals of a man and men and women are usually carried out to get children, so the male genitalia must enter the female genitalia, so that semen is released from a woman who is not his wife. Criminal law responsibility for acts of rape against women outside of marriage ties in the Criminal Code or often called *verkrachting*, the provisions governing the form of the act and punishment are contained in Article 285 of the Criminal Code. The judge's consideration of the act of rape in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 992 K/Pid/2020 concerning the Defendant's actions has fulfilled the criminal elements in Article 285 of the Criminal Code as in the Public Prosecutor's First Alternative Indictment, convicting the Defendant therefore with imprisonment for 8 (eight) years.

Suggestions in this study are that the rule of law in protecting women from acts of violence and rape is given more attention so that more and more victims do not become victims. It is hoped that every perpetrator of rape can be punished with a harsh sentence so that it will have a deterrent effect on others so that the same incident will not happen again. It is hoped that the judge, in considering the rape crime case, can provide protection for each victim so that besides the victim does not feel traumatized, the victim does not feel ashamed.

Keywords: Legal Protection, Women, Rape